

## **BAB VI PENUTUP**

### **VI.1 Kesimpulan**

Hubungan perdagangan Indonesia dengan EFTA didorong dengan adanya perundingan dalam kesepakatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang diharapkan tercapai pada tahun 2020 lalu. Salah satu yang ingin diwujudkan yaitu perjanjian kerjasama ekonomi yang komprehensif (CEPA) antara Indonesia dengan negara EFTA, atau yang disebut dengan IE-CEPA. Negara tetangga seperti Singapore dan Filipina sudah terlebih dahulu melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan EFTA, yang disusul dengan Vietnam yang dalam tahap perundingan. Kemudian yang menjadi tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana agar kedepannya mampu bersaing terhadap produk ekspor sejenis jika negara pesaing juga melakukan upaya diplomasi yang sama terhadap negara EFTA dalam meningkatkan ekspor unggulannya di era perdagangan bebas saat ini.

Berdasarkan konsep diplomasi ekonomi, IE-CEPA menjadi sarana untuk membawa hubungan bilateral negara-negara yang terlibat ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini akan membuka jalan menuju hubungan ekonomi yang lebih kuat serta berkontribusi penting pada kelanjutan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkesinambungan bagi rakyat Indonesia dan negara-negara EFTA. Sifat saling melengkapi antara perekonomian Indonesia dan EFTA sangatlah penting, dan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif melalui IE-CEPA. Peningkatan hubungan ekonomi membuka berbagai kesempatan dan pertumbuhan lebih lanjut di sektor-sektor yang menjadi perhatian bersama dan sejalan dengan prioritas Pemerintah Indonesia seperti infrastruktur darat dan maritim, elektronik, energi, tekstil, dan hasil laut.

Peningkatan pesat ekspor Indonesia ke EFTA pada tahun 2021, tidak kemudian menutup fakta bahwa ekspor Indonesia masih kalah kompetitif. Sejak tahun 2019 hingga 2020 yang lalu ekspor Indonesia ke EFTA terus mengalami penurunan. Sehingga keberadaan Indonesia-EFTA CEPA diharapkan dapat menjaga pertumbuhan dan meningkatkan ekspor Indonesia ke pasar EFTA bahkan menjadi *hub regional* menuju pasar EU.

Persaingan komoditas ekspor sepatu dengan negara kompetitor besar seperti China dan Vietnam, hambatan pada kondisi sepatu ekspor nasional, kebutuhan terhadap permodalan asing, standarisasi produk ekspor ke negara tujuan, merupakan beberapa tantangan yang menjadi perhatian pemerintah serta pihak terkait. Pelaku usaha dalam hal ini juga mendapat pengaruh dari beberapa harapan yang diupayakan pemerintah terkait kondisi industri sepatu Indonesia. Hal tersebut memerlukan strategi yang memang harus menjadi kepentingan bersama dalam upaya pelaksanaan diplomasi ekonomi. Terlebih IE-CEPA memberikan peluang yang baik untuk ekspor Indonesia kedepannya. Pemanfaatan IE-CEPA untuk memasuki pasar UE yang saat ini perjanjiannya pun belum diratifikasi karena beberapa hal, sehingga kerjasama dengan EFTA ini merupakan kesempatan emas.

Rencana strategis yang dilakukan Indonesia terhadap produk alas kaki, terjadi keseriusan pemerintah dalam mengembangkan komoditas produk ekspor unggulan seperti sepatu periode 2017-2021 ke negara EFTA. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mendorong kemajuan industri dalam negeri, terlebih dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Salah satunya pengembangan industri alas kaki yang didorong untuk memperluas pasar dan volume ekspor dalam memperkuat pangsa pasar Indonesia di ranah global. Sama halnya dengan pemilihan bahan baku untuk meningkatkan nilai tambah dan devisa.

Pada tahun 2017-2021 nilai ekspor produksi alas kaki nasional, jumlah tenaga kerja, serta nilai investasi mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan. Kemudian, yang menjadi persoalan adalah bagaimana Indonesia meningkatkan dan memaksimalkan kerjasama perjanjian perdagangan bebas terhadap pasar potensial seperti EFTA. Di tahun 2017-2018, Indonesia mulai serius untuk mereaktivasi perjanjian yang sudah lama ditunda karena pergantian pemimpin maupun hambatan terkait lamanya suatu anggota dalam menyetujui persetujuan hingga akhirnya berhasil diratifikasi. Diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia juga terlihat dari upaya pengembangan ekspor di domestik serta upaya dalam mengikuti perundingan yang menghasilkan kesepakatan dan diresmikannya IE-CEPA.

Adanya EFTA ini, secara geografis juga menjadi salah satu hambatan. Artinya, semua yang berkontribusi harus hati-hati terlebih adanya para pesaing yang memiliki daya beli lebih tinggi. Strategi diplomasi ekonomi yang berlangsung

sudah sejak lama, pada pelaksanaannya belum memberikan pengaruh pada peningkatan ekspor alas kaki Indonesia. Upaya promosi perdagangan yang menjadi aspek dalam diplomasi ekonomi, Aprisindo menyikapinya tidak sesuai ekspektasi yang ada. Justru selama ini lebih banyak inisiatif *personal* dalam mencari akses ke luar negeri. Terkait dengan adanya fasilitas sebelumnya, tidak berjalan sesuai rencana menurut pelaku usaha. Dalam hal ini, sosialisasi terhadap pengenalan regulasi akses pasar EFTA belum tersampaikan dengan maksimal.

## **VI.2 Saran**

Beberapa hambatan yang dihadapi diplomasi ekonomi Indonesia dalam meningkatkan ekspor sepatu menjadi persoalan serius bagi komoditas ekspor unggulan. Daya saing industri alas kaki Indonesia masih rendah dibandingkan China karena beberapa faktor seperti harga, regulasi dan standarisasi ekspor. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ekspor industri alas kaki Indonesia diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Industri alas kaki Indonesia harus meningkatkan bahan baku yang ramah lingkungan dalam produksi, mengingat beberapa negara maju di Kawasan Eropa khususnya Swiss dan negara EFTA lainnya menolak impor produk untuk komoditi yang menggunakan bahan baku tersebut.
2. Indonesia memiliki ketergantungan ekspor yang tinggi terhadap negara-negara potensial, sehingga perlu memaksimalkan kerjasama dengan IE-CEPA, terlebih sebagai alternatif *entry point* terhadap pasar Uni Eropa.
3. Indonesia perlu mengatasi ketergantungan terhadap bahan baku impor dalam meningkatkan kualitas sepatu agar dapat bersaing secara signifikan dengan produsen sepatu lainnya sesuai selera dan tren konsumen global.
4. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur untuk mendukung distribusi produk di industri alas kaki, serta mengevaluasi aturan yang lebih jelas mengenai upah minimum pekerja agar tidak ada yang merugikan berbagai pihak karena dapat menjadi penghalang utama masuknya investasi asing di industri ini.